



9 772088 235001

DINAMIKA SIKAP INDONESIA ATAS MENCUATNYA KEMBALI ISU AMBALAT

Sita Hidriyah*

Abstrak

Isu sengketa Blok Ambalat kembali mencuat setelah pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk mempertahankan hak dan kedaulatan Sabah. Tulisan ini membahas dinamika sikap Indonesia dalam menanggapi pernyataan Malaysia pada Blok Ambalat yang kembali muncul terkait wilayah perbatasan maritim. Malaysia dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih atas Ambalat. Kedua kepala negara telah sepakat untuk bersama-sama mengembangkan wilayah tersebut walaupun belum menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah bilateral yang berlangsung sejak lama. Secara keseluruhan, sikap Indonesia mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai, namun tanpa mengorbankan kedaulatan. Sikap ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan. Komisi I dapat mendorong Kementerian Luar Negeri dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya secara maksimal agar kesepakatan yang diharapkan dapat tercapai dengan menjamin tidak adanya pengurangan, pelemahan, atau pengaburan status hukum wilayah kedaulatan Indonesia.

Pendahuluan

Blok Ambalat sebagai wilayah maritim strategis di Laut Sulawesi yang kaya sumber daya minyak dan gas, kembali disorot setelah pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Sabah pada 3 Agustus 2025. Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk melindungi kedaulatan Sabah, termasuk wilayah yang disebut sebagai "Laut Sulawesi" (Blok ND6 dan ND7), serta menolak istilah "Blok Ambalat" yang digunakan Indonesia. Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, sehingga memicu reaksi publik di Indonesia, karena dianggap sebagai upaya menegaskan klaim Ambalat sepihak (Leba, 2025).

Indonesia yang mengklaim Ambalat berdasarkan Perjanjian Landas Kontinen 1969 dan UNCLOS 1982, menanggapi dengan sikap diplomatik namun tegas. Presiden Prabowo Subianto menekankan penyelesaian damai melalui dialog, sejalan dengan kesepakatan joint

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: sita.hidriyah@dpr.go.id.

development yang ditandatangani pada 27 Juni 2025 (Mahmud, 2025). Atas pernyataan tersebut, tulisan ini akan menganalisis dinamika sikap Indonesia terhadap isu Ambalat pasca-pernyataan Anwar dengan berupaya mempertahankan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia.

Mencuatnya Kembali Isu Blok Ambalat

Isu Ambalat bermula ketika Indonesia dan Malaysia sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada tahun 1969. Kedua negara mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat. Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang menyebutkan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Sejak saat itu, sengketa antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas. Pada 1979, Malaysia justru memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menuai penolakan dari pemerintah Indonesia karena klaim tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 (Verelladevanka & Tri, 2023).

Sengketa Blok Ambalat mendapat perkembangan terbaru setelah pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar pada 29 Juli 2025. Prabowo menerima kunjungan Anwar sebagai bagian dari Konsultasi Tahunan ke-13 yang menjadi forum komunikasi tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Anwar menegaskan bahwa persoalan perbatasan di wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia tidak akan berkembang menjadi konflik militer seperti yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Ia memastikan bahwa penyelesaian sengketa akan tetap dilakukan melalui jalur diplomasi (“Jejak Sejarah Sengketa”, 2025). Sebelumnya, ketika Anwar dan Prabowo bertemu di Jakarta pada 27 Juni 2025, mereka juga sepakat untuk membangun wilayah Ambalat secara bersama (Mahmud, 2025).

Pada lawatannya ke Sabah tanggal 3 Agustus 2025, Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk melindungi kedaulatan Sabah. Ia juga menyatakan akan menegosiasikannya dengan baik dan berjanji akan mempertahankan setiap jengkal wilayah Sabah serta melibatkan pemerintah Sabah dalam negosiasi. Pernyataan ini dianggap sebagai respons terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dan memicu perhatian publik kedua negara. Masyarakat Malaysia secara umum mendukung kuat pemerintahnya, sementara penduduk lokal Sabah khawatir akan hak-haknya yang dapat terabaikan. Sedangkan masyarakat Indonesia mempertanyakan bagaimana kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Lebih lanjut lagi, Malaysia tetap menolak istilah “Blok Ambalat” yang digunakan Indonesia dan bersikukuh menggunakan “Laut Sulawesi” berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979. Hal ini dipandang oleh sebagian pihak di Indonesia sebagai bentuk penegasan klaim kedaulatan yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengungkapkan bahwa penyebutan istilah ‘Laut



Ambalat' bukan sekadar soal nama, melainkan bagian dari penegasan klaim wilayah yang sah. Ia mengatakan, pihaknya menghargai sikap pemerintah Malaysia yang ingin menyelesaikan sengketa dengan damai dan jalur negosiasi. Meski demikian, Dave mengingatkan pemerintah harus waspada dengan memperkuat posisi diplomatik, hukum, dan pengawasan di obyek sengketa. Selain itu, Komisi I DPR RI mendorong pendekatan diplomatik yang konsisten dan berbasis hukum internasional, termasuk melalui ASEAN dan forum maritim regional, guna menjaga kepentingan nasional secara berkelanjutan ("Komisi I DPR", 2025).

Dinamika Sikap Pemerintah Indonesia

Muncuatnya kembali isu Ambalat menimbulkan dinamika sikap pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah bahwa Indonesia mengutamakan pendekatan damai. Pada 7 Agustus 2025 Prabowo menyatakan bahwa ada iktikad baik dari dua pihak dengan upaya yang menekankan pentingnya hubungan erat dan penyelesaian berbasis dialog. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, menegaskan bahwa Indonesia selalu mematuhi prinsip ASEAN untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, sesuai dengan UNCLOS 1982 ("Mengapa Indonesia", 2025).

Pemerintah Indonesia juga menegaskan kedaulatannya atas Blok Ambalat. Pemerintah Indonesia tetap teguh pada posisi hukum bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957, Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969, dan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985. Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen, menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Blok Ambalat adalah "harga mati" yang tidak bisa diganggu gugat. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas legislatif dalam mendukung posisi pemerintah ("Blok Ambalat", 2025).

Hal yang tidak kalah penting adalah dukungan terhadap *joint development*. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian dan lembaga, terus mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan Otoritas Pengembangan Bersama (Joint Development Authority) untuk mengelola sumber daya secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan Prabowo dan Anwar telah menyepakati pengelolaan bersama Blok Ambalat melalui skema *joint development* untuk mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas sambil menunggu penyelesaian batas hukum ("Setelah Sengketa Panjang", 2025).

Polemik nomenklatur juga mendapat perhatian serius Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menanggapi pernyataan Malaysia yang menolak istilah "Ambalat" dengan tetap tenang dan konstruktif. Selain pada perbedaan istilah, Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan bahwa pembahasan batas maritim masih dalam tahap penjelasan awal, dan aspek teknis akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian terkait. Pemerintah Indonesia



menilai pernyataan Malaysia sebagai bagian dari dinamika politik domestik, terutama menjelang pemilihan umum di Sabah, dan tidak ingin terjebak dalam respons reaktif (“Sengketa Blok”, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah Indonesia tampak berusaha tetap tenang, tidak bereaksi berlebihan, dan terus mengutamakan dialog damai. Namun, pemerintah Indonesia juga harus tetap meningkatkan kewaspadaan di Ambalat. Hal ini senada dengan pernyataan Dave Laksono, agar mendorong TNI AL untuk memperkuat patroli. Langkah ini perlu dilakukan guna mencegah pelanggaran seperti yang terjadi pada 2005 dan 2009, dimana Malaysia secara sepihak mengumumkan konsesi minyak, serta mengerahkan armada kapal dan pesawat tempurnya beberapa kali memasuki wilayah Ambalat (“Anggota DPR”, 2025). Langkah pemerintah perlu tetap mengacu pada pengalaman yang telah lampau.

Meski memiliki sejarah ketegangan atas klaim wilayah, kedua kepala negara menunjukkan semangat untuk membangun hubungan yang lebih produktif. Saat ini jalan diplomasi dan negosiasi bilateral menjadi opsi utama yang dapat ditempuh oleh kedua negara karena langkah ini dinilai sebagai cara paling efektif mencapai solusi damai dan menghindari sengketa berkepanjangan. Ambalat bukan hanya soal kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut diplomasi, hukum internasional, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sehingga diperlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai elemen kelembagaan Indonesia. Apresiasi perlu diberikan kepada pemerintah yang merespons Malaysia dengan tenang, konstruktif, dan berorientasi pada diplomasi. Selain itu, sikap Anwar tentunya wajar dilakukan sebagai seorang perdana menteri yang ingin melindungi kepentingan nasional. Ini yang menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara menjaga kedaulatan dan hubungan baik.

Penutup

Isu Ambalat kembali mencuat setelah pernyataan PM Anwar Ibrahim untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah Sabah dan mengganti penggunaan nomenklatur Laut Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Meski memicu reaksi publik dan kekhawatiran di Indonesia, kedua negara tetap berkomitmen untuk mengutamakan penyelesaian damai melalui diplomasi dan *joint development*. Langkah ini mencerminkan upaya menjaga hubungan bilateral yang erat dalam semangat ASEAN, meskipun tantangan seperti perbedaan nomenklatur dan sensitivitas politik tetap ada. Perundingan yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan solusi yang adil dan saling menguntungkan.

Indonesia dan Malaysia pada intinya sama-sama mengutamakan penyelesaian damai dengan mengedepankan iktikad baik. Secara keseluruhan, isu Ambalat didominasi oleh upaya diplomatik dan wacana kerja sama ekonomi. Langkah ini mencerminkan niat baik bersama untuk menghindari konflik dan fokus pada keuntungan bersama, sambil tetap



menjaga kedaulatan masing-masing. Di sisi lain, Indonesia harus mempersiapkan diri jika penyelesaian tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, Komisi I dapat mendorong Kementerian Luar Negeri dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya secara maksimal agar kesepakatan yang diharapkan dapat tercapai dengan menjamin tidak adanya pengurangan, pelemahan, ataupun pengaburan status hukum wilayah kedaulatan Indonesia.

Referensi

- Citra, A. (2025, Juni 27). Indonesia, Malaysia bakal kelola bersama Blok Ambalat. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-malaysia-bakal-kelola-bersama-blok-ambalat>
- Leba, E. E. (2025, Agustus 10). Mengapa persoalan sengketa Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat muncul lagi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-persoalan-sengketa-indonesia-malaysia-di-blok-ambalat-muncul-lagi>
- Mahmud, A. H. (2025, Agustus 8). Pengamat: Indonesia dan Malaysia akan rugi jika sengketa Ambalat tak segera diselesaikan. *Cna.id*. <https://www.cna.id/asia/pengamat-indonesia-dan-malaysia-akan-rugi-jika-sengketa-ambalat-tak-segera-diselesaikan-36311>
- PB HMI. (2025, Juli 5). Blok Ambalat dikelola bersama RI-Malaysia, PB HMI: Presiden Prabowo harus tegas tentang kedaulatan, Ambalat tetap milik NKRI. *Pbhmi.id*. <https://pbhmi.id/blok-ambalat-dikelola-bersama-ri-malaysia-pb-hmi-presiden-prabowo-harus-tegas-tentang-kedaulatan-ambalat-tetap-milik-nkri/>
- Puspitasari, F. (2025, Agustus 7). Anggota DPR minta TNI AL patroli usai Malaysia sebut Ambalat jadi laut mereka. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/07/12491931/anggota-dpr-minta-tni-al-patroli-usai-malaysia-sebut-ambalat-jadi-laut>
- Rahmawati, D. (2025, Agustus 7). Komisi I DPR: Penyebutan Laut Ambalat bukan hanya nama tapi penegasan wilayah sah. *Detikcom*. <https://news.detik.com/berita/d-8048919/komisi-i-dpr-penyebutan-laut-ambalat-bukan-hanya-nama-tapi-penegasan-wilayah-sah>
- Jejak sejarah sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. (2025, Agustus 3). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/internasional/jejak-sejarah-sengketa-blok-ambalat-antara-indonesia-dan-malaysia-2054437>
- Verelladevanka, A., & Tri, I. (2023, April 27). Sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/27/200000579/sejarah-munculnya-sengketa-batas-wilayah-blok-ambalat>

